

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA  
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN  
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA  
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500182463123			
Pengusaha Kena Pajak:			
Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI, CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750 NPWP : 0715420659018000			
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:			
Nama : CHN STARS INDONESIA Alamat : JL KAMAL RAYA NO.8B, RT 006, RW 002, TEGAL ALUR, KALIDERES, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11820 #0939827374037000000000 NPWP : 0939827374037000 NIK : - Nomor Paspor : - Identitas Lain : - Email: pt.chintelectricappliances@gmail.com			
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	853600	Sakelar 2 Tombol 2 Arah (S moky Grey) Rp 24.972,97 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	24.972,97
2	853600	Sakelar 1 Tombol 1 Arah (S moky Grey) Rp 17.193,69 x 1,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	17.193,69
3	853600	Sakelar 3 Tombol 1 Arah (S moky Grey) Rp 32.950,45 x 3,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	98.851,35
4	853600	Stop Kontak Tipe Schuko (S moky Grey) Rp 20.637,39 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	206.373,90
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			347.392,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			318.443,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			38.213,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 20 Juni 2025



Ditandatangani secara elektronik  
MING XIAO

(Referensi: 70CH-250612-0006)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.